

Perempuan dalam Pembangunan dan Politik: Perspektif Sosial Budaya Manggarai

Alfianus F. Girwan¹, Piers Andreas Noak², Tedi Erviantono³.

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Udayana

Email: alphinyonas@gmail.com¹, piersandreasnoak@unud.ac.id², erviantono2@unud.ac.id³

ABSTRACT

Gender has an important position in achieving sustainable development goals. Social construction that places gender as one of the differentiating criteria in the community's socio-cultural, it makes women have limited space as part of a marginal group in society. The role of women in development aspects, such as in politics is increasingly open. However, women's involvement in the public is always faced with various obstacles.

This study aims to examine the socio-cultural perspectives of the East Manggarai community regarding the position of women in development and politics. This research is using qualitative method, with data collection techniques through interviews and literature studies.

The results of the study show that the role of women in politics and development in East Manggarai is still low. Patriarchal culture also influences the social perspective of the Manggarai people about women in politics. Furthermore, women's involvement in development and politics is strongly influenced by the level of education, socio-cultural perspective, political awareness, and the local environment. However, the study also shows the people of Manggarai have an awareness of the important role of women in politics and development.

Keywords: *gender, development, politics, social-culture perspectives.*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan yang berkelanjutan sejatinya harus melibatkan semua Komponen agar tidak terjadi disparitas dalam mencapai tujuannya. Ginanjar Kartasasmita (1955) dalam Hasanah & Musyafak, (2017) berpendapat bahwa pembangunan dapat berjalan dengan mengandalkan kekautan yang ada pada pemerintah, namun hasilnya tidak sama apabila dibandingkan dengan

pembangunan yang mendapatkan dukungan dan partisipasi dari rakyat. Keterlibatan semua pihak penting dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang tidak menimbulkan kesenjangan antar pihak, kelompok, maupun wilayah.

Pada dasarnya, konsep pembangunan berkelanjutan ini memuat berbagai fokus kajian penting yang tujuannya melibatkan semua pihak dalam proses

maupun objek pembangunannya, salah satunya terkait kesetaraan gender. Kesetaraan gender menjadi salah satu aspek penting dalam mencapai tujuan pembangunan yang bersifat inklusif. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs (*sustainable development goals*) yang menjadi salah satu pedoman dalam rancangan pembangunan nasional Indonesia yang poin-poin utamanya termuat dalam rancangan utam RPJMN dan RPJMD pada dasarnya memberikan keterbukaan agar semua kelompok maupun individu dapat berperan dalam pembangunan serta mampu merepresentasikan kepentingan ataupun kebutuhannya. Peran SDGs dalam pembangunan yakni untuk mengakomodasi kepentingan semua pihak/kelompok.

Pelibatan semua pihak untuk ambil bagian dalam pembangunan ini juga menjadi landasan bagi pemerintah dalam membentuk regulasi yang mengedepankan kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak dalam ranah social, dimana negara hadir sebagai payung perlindungan bagi representasi hak kaum marginal; salah satunya perempuan.

Kebijakan terkait kesetaraan dan keadilan dalam pembangunan sebenarnya belum mengakomodasi secara optimal kebutuhan ataupun kepentingan semua pihak. Regulasi yang dibuat untuk mengakomodasi kepentingan kaum marginal pada dasarnya masih mendapat kendala dalam pengimplementasiannya. Kaum perempuan maupun kelompok marginal lainnya belum memiliki akses yang optimal

dan setara dalam ruang publik. Salah satu bentuk upaya meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan adalah melalui lembaga politik. Ranah politik menjadi gambaran demokrasi yang memberi ruang kesetaraan hak sebagai warga Negara.

Namun, dalam pelaksanaannya, regulasi yang ada belum mencapai tujuan yang optimal. Pada lembaga politik legislative misalnya, terdapat kebijakan afirmasi partai politik yang mewajibkan pemenuhan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan baik pada kepengurusan partai maupun pada calon anggota legislative perempuan pada setiap periode pemilu. Realitanya pada tingkat daerah, keterwakilan perempuan ini hanya terbatas pada pemenuhan kuantitas sebagai persyaratan untuk setiap partai politik peserta pemilu.

Salah satu contoh nyata adalah rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislative maupun partai politik di Kabupaten Manggarai Timur. Dari segi perannya dalam pembangunan, keterlibatan perempuan dalam politik menjadi salah satu wujud pelaksanaan demokrasi. Perempuan yang terlibat dalam pembangunan bukan lagi sebagai objek pembangunan yang mana kebijakan yang ada dirancang bukan oleh perempuan sendiri yang paham akan urgensi maupun haknya yang penting untuk direpresentasikan dalam kebijakan. Hal ini mengakibatkan berbagai regulasi terkait pemberdayaan perempuan terkesan belum mampu menyentuh akar rumput objek pembangunan, sehingga kesadaran

perempuan akan perannya dalam pembangunan hanya tampak pada kalangan perempuan dengan kriteria tertentu.

Berbagai kendala terkait keterlibatan perempuan dalam pembangunan, terutama pada bidang politik; yang menjadi salah satu bentuk keterlibatan aktif sebagai bentuk demokrasi, tidak terlepas dari konstruksi sosial budaya masyarakat.

Pada umumnya, masyarakat Indonesia yang syarat akan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, dalam kaitannya dengan pembangunan yang inklusif, warisan budaya menjadi salah satu control yang di lain sisi juga menjadi kendala yang menghasilkan diskriminasi secara sosial. Salah satu bentuk diskriminasi karena adanya konstruksi sosial adalah terkait peran perempuan dalam politik maupun pembangunan. Daerah Manggarai yang menjadi salah satu wilayah yang masyarakatnya memiliki budaya patriarki, tentunya menghadapi masalah yang sama terkait keterlibatan perempuan dalam pembangunan.

B. LANDASAN TEORI DAN KONSEP

Penelitian ini pada dasarnya berangkat dari permasalahan terkait fenomena tantangan kesetaraan dan keadilan gender dalam konteks sosial-budaya masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Manggarai. Pada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, urgensi peran perempuan dalam pembangunan tampaknya belum menyentuh

akar rumput. Terdapat banyak kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan peran keadilan dan kesetaraan gender dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.

Dalam penelitian ini, landasan teori yang digunakan adalah terkait kesetaraan dan keadilan gender. Konsep *Gender and Development (GaD)* digunakan untuk mengkaji peran perempuan dalam ranah publik. Di samping itu, teori konstruksi sosial digunakan sebagai dasar dalam kaitannya dengan perpektif sosial-budaya masyarakat Manggarai.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan mengkaji perspektif sosial budaya masyarakat Manggarai terkait peran perempuan dalam pembangunan dan politik. Fokus kajian merupakan daerah Kabupaten Manggarai Timur. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang merupakan pendekatan penelitian dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dengan peneliti sebagai instrument kunci (Anggito & Setiawan, 2018).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Perempuan dan Pembangunan

Dalam sejarah budaya masyarakat Manggarai, konsep pengambilan keputusan lebih identik dengan peran laki-laki. Adat-istiadat Manggarai memiliki konsep kepemimpinan tidak jauh berbeda dengan kondisi kepemimpinan dalam budaya nusantara pada umumnya. Budaya patriarki

masih melekat dalam kehidupan social masyarakat.

Perpektif social masyarakat Manggarai turut dipengaruhi oleh budaya yang secara turun-temurun diwariskan pada masyarakatnya. Hal ini memunculkan adanya disparitas social di tengah masyarakat, salah satunya terkait kesetaraan dan keadilan gender. Secara turun-temurun, peran dan kedudukan perempuan dalam ranah social masih dianggap kurang penting. Hal ini mengakibatkan perempuan dianggap subordinat dan hanya menempati posisi domestic dalam perannya sebagai individu maupun dalam ranah social.

Perempuan yang tergolong dalam kaum marginal memiliki keterbatasan ruang dalam merepresentasikan urusan terkait haknya di tengah struktur social. Dalam budaya masyarakat Manggarai, kultur status antara perempuan dan laki-laki telah ada sejak lahir terutama dalam keperluan adat-istiadat terkait kelahiran bayi. Hal ini tampak pada status budaya yang disematkan terhadap perempuan dan laki-laki.

Dalam budaya Manggarai, laki-laki di sebut sebagai “ata one” (orang dalam) dan perempuan disebut sebagai “ata pe’ang” (orang luar). Hal ini dipahami sebagai status dalam keluarga antara anak laki-laki dan anak perempuan. Anak perempuan dikatakan sebagai pihak ayang akan keluar dari rumah karena mengikuti suami saat watunya menikah, sedangkan anak laki-laki akan menjadi penerus keluarga dan menjadi pewaris dalam keluarga Manggarai. Budaya

tersebut menjadikan peran perempuan dalam budaya Manggarai dianggap lemah dan tidak penting dalam hal pengambilan keputusan dan kepemimpinan.

Dalam kaitannya dengan pembangunan, hak dan kewajiban perempuan masih dianggap semu. Berdsarkan hasil kajian, terlihat bahwa pada masyarakat Manggarai, terutama pada wilayah kajian Manggarai Timur, peran perempuan dalam pembangunan belum tampak dan jauh dari optimal. Pembangunan yang meliputi aspek social, ekonomi, politik, lingkungan, dan budaya pada dasarnya masih menempatkan perempuan sebagai subordinasi. Meskipun dari segi system pemerintahan formal, beberapa jabatan structural maupun posisi strategis pemerintahan daerah telah ditempati perempuan, namun keterbukaan public pada pengakuan terhadap perempuan masih rendah.

Di samping itu, dalam konteks pembangunan nasional yang merujuk pada pembangunan yang berkelanjutan, kesetaraan dan keadilan gender menjadi bagian dari rancangan pembangunan seperti yang termuat pada RPJMN 2014-2019, RPJMN 2019-2024, dan yang beberapa waktu lalu menjadi salah satu focus utama dalam diskusi public terkait RPJMN 2025-2029. Namun, konsep tujuan pembangunan berkelanjutan ini sejatinya belum secara langsung menyentuh akar rumput pembangunan, salah satunya pada bidang politik. Kesetaraan dan keadilan gender

masih menjadi aspek yang membutuhkan pendekatan yang efektif dalam kaitannya dengan keterlibatan perempuan dalam politik.

Demokrasi pada dasarnya menjadi system keterbukaan yang menjunjung kesetaraan dan keadilan menjadi fondasi yang kuat untuk perempuan ikut terlibat dalam politik. Namun, tampaknya demokrasi ini belum sepenuhnya diadopsi masyarakat, terutama yang pada masyarakat yang masih kental dengan budaya patriarki. Konstruksi social memberikan kesenjangan gender.

Secara umum, konteks peran perempuan bagi masyarakat Manggarai belum optimal. Pemahaman akan pentingnya perempuan untuk terlibat dalam pembangunan masih meliputi perempuan dan masyarakat pada kalangan tertentu. Pada wilayah pedesaan, tampaknya kesadaran ini belum optimal. Laki-laki masih dianggap penting dalam pengambilan keputusan ataupun posisi penting yang terkait dengan kepemimpinan pada intitusi sosial.

Namun, meskipun kesadaran masyarakat dalam hal keterlibatan langsung perempuan dalam perumusan kebijakan ataupun upaya pembangunan masih tergolong rendah, pandangan konteks dasar kesetaraan dalam lingkup keluarga sudah semakin baik. Dalam keluarga yang dulunya dikenal memiliki cara pandang bahwa yang penting untuk diperhatikan adalah laki-laki karena berstatus sebagai pewaris keluarga. Saat ini, pandangan tersebut mulai bergeser, informasi yang didapatkan

menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam keluarga, baik dalam hal pembagian tugas dan tanggung jawab pekerjaan, maupun dalam hal akses pendidikan terutama bagi anak-anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada dasarnya perpektif sosial budaya yang kental dengan budaya patriarki pada masyarakat Manggarai perlahan akan bergeser karena semakin majunya peradaban dan memperbesar kesempatan akan kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat itu sendiri.

Keterbukaan persepsi sosial masyarakat yang menunjukkan adanya kesempatan yang besar bagi perempuan untuk aktif dalam proses pembangunan. Keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan yang mulai tampak dalam bentuk keterlibatan dalam politik maupun organisasi masyarakat lainnya akan memudahkan upaya pemberdayaan perempuan. Partini (2012) berpendapat bahwa posisi dan peran perempuan dalam organisasi masyarakat menjadi modal dasar kepemimpinan dan pengalaman kehidupan sosial. Peran dan posisi perempuan yang signifikan dalam masyarakat semakin memudahkan perempuan untuk terlibat dalam pembangunan terutama dalam merepresentasikan kepentingan kaum perempuan dan kaum marginal lainnya.

b. Peran Perempuan dalam Politik

Sebagai bagian dari pembangunan, politik merupakan aspek penting yang dapat

menjadi wadah aspirasi dalam proses pembangunan nasional. Kedudukan politik dalam proses pembangunan tidak dapat dipisahkan. Dapat digambarkan, proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dari situasi dan proses politik yang berjalan pada periode bersangkutan.

Dalam proses pemerintahan yang telah berjalan di Kabupaten Manggarai Timur, kedudukan pada lembaga pemerintahan baik eksekutif maupun legislative didominasi oleh laki-laki. Pada setiap periode pemilihan umum daerah, pada lembaga eksekutif hingga saat ini belum ada calon eksekutif perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada keterlibatan perempuan masih sangat rendah dalam pemerintahan di Kabupaten Manggarai Timur. Keterlibatan perempuan dalam pemerintahan ini dapat juga diasumsikan sebagai bagian dari bentuk peran perempuan dalam politik.

Selain itu, pada lembaga legislative daerah Kabupaten Manggarai Timur, selama 3 periode pemilu legislative peserta perempuan yang mendaftar sebagai calon anggota legislative dari masing-masing partai politik mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Partai politik peserta pemilu membuka peluang bagi perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam politik aktif. Namun, keikutsertaan ini tampaknya hanya sebagai persyaratan untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan bagi setiap partai

politik. Elektabilitas dan kualitas peserta perempuan tergolong masih rendah.

KPU Kabupaten Manggarai Timur mencatat bahwa pada 2 periode pemilu legislatif yang telah berjalan yakni 2014-2019 dan 2019-2024, setiap partai politik yang berkontestasi sudah memenuhi kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam pengajuan calon anggota legislatif. Namun, selama 2 periode ini calon anggota legislatif perempuan yang terpilih hanya 1 orang dari masing-masing periode, yakni periode 2014-2019 dari Partai PAN dan periode 2019-2024 dari Partai Perindo.

Keterwakilan perempuan dalam politik yang tergambar pada keterwakilan pada lembaga legislative Kabupaten Manggarai Timur, secara langsung dapat diasumsikan bahwa persepsi masyarakat terkait peran perempuan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan juga tergolong rendah. Perempuan masih menempati posisi kedua dalam statusnya sebagai bagian dari masyarakat. Ruang publik memberikan kesenjangan bagi perempuan sehingga perannya dianggap kurang penting terutama dalam hal kepemimpinan. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian Maria T. N. Madur (2022), tentang keterwakilan perempuan pada lembaga legislative di Kabupaten Nggada pada Pemilu 2019, yakni minimnya keterwakilan perempuan disebabkan oleh adanya pengklasifikasian kaum perempuan ke dalam kelompok orang kelas rendah yang

tidak diprioritaskan dalam ajang pemilu legislative tahun 2019.

Meskipun kondisi keterwakilan yang ada pada lembaga politik sangat rendah, persepsi masyarakat terhadap perempuan yang ikut ambil bagian dalam lembaga politik sudah sangat terbuka. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa masyarakat juga menginginkan wakil perempuan dalam politik dan pemerintahan di Kabupaten Manggarai Timur. Mereka menilai bahwa perempuan seharusnya ikut terlibat dalam politik karena perempuan lebih paham urusan yang berkaitan dengan perempuan. Adanya wakil perempuan diharapkan dapat menrepresentasikan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan perempuan yang selama ini luput dari perhatian pemerintah. Salah satu bentuk keterbukaan ini terlihat dari kesadaran masyarakat dalam memilih pemimpin di tingkat desa. Salah satu contohnya yakni dalam pilkades tahun 2023, Kepala Desa yang terpilih adalah perempuan, yakni di Desa Pa'an Leleng, Kecamatan Kota Komba Utara, Kabupaten Manggarai Timur.

E. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya, warisan budaya masyarakat Manggarai sangat mempengaruhi persektif sosial masyarakat. Hal ini tampak pada cara masyarakat menilai peran perempuan dalam politik dan pembangunan belum sepenuhnya tergolong penting. Kondisi ini tampak pada keterlibatan

dan peran perempuan dalam lembaga politik yang tergolong masih sangat rendah. Pada struktur pemerintahan eksekutif, perempuan menempati posisi penting dan strategis, namun pada lembaga legislative keterwakilan perempuan masih sangat rendah. Implementasi kuota afirmasi keterwakilan minimal 30% perempuan pada partai politik dinilai hanya sebagai bentuk pemenuhan aturan pemilu, sedangkan kualitas maupun elektabilitas perempuan yang diikutsertakan masih jauh dari yang diharapkan. Kendala utama yang dapat disimpulkan dalam menilai rendahnya peran perempuan dalam politik dan pembangunan di daerah Manggarai Timur antara lain pendidikan, persepsi sosial-budaya, kesadaran diri, dan ruang dan kesempatan yang disediakan publik.

Meskipun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa saat ini masyarakat Manggarai memiliki pemahaman akan kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki. Hal ini terlihat bahwa pada tingkat komunitas paling kecil seperti keluarga, orang tua sudah tidak mendiskriminasi perlakuan terhadap anak, baik dalam tugasnya sebagai anak di rumah, maupun dalam hal akses pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi., dan Johan Setiawan. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Jejak.
- Hasanah, Ulfatun., dan Musyafak, Najahan. (2017). *Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan dalam*

Pembangunan Politik. *Jurnal SAWWA*, Volume 12, No.3, Oktober 2017.

Madur, Maria T.N. (2022). Politik dan Perempuan (Studi tentang Tingkat Keterwakilan Perempuan pada Pemilu Legislatif Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024). *Artikel-Skripsi*. Diakses pada: <http://eprints.ipdn.ac.id/9912/1/Repository%20Skripsi%20Maria%20Theresia%20Ngindang%20Madur.%2023.%20A3.%20PIT.%20POL%20PEM.pdf>

Partini. (2012). Politik Adil Gender: Sebuah Paradoks. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Volume 1 No.2, November 2021.

Probosiwi, Ratih. (2015). Perempuan dan Perannya dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Women and its Roles on Social Welfare Development). *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara – NATAPRAJA*, Volume 3 Nomor 1, Tahun 2015.